



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 259 TAHUN 2017

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Gubernur;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
18. Keputusan Gubernur Nomor 1296 Tahun 2016 tentang Uang Transport Dinas Kegiatan Pengawasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 259 TAHUN 2017
Tanggal 8 Februari 2017

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian yang baik.

Pengawasan dan pengendalian tidak akan berjalan dengan baik apabila dalam penyusunan perencanaan pengawasan tidak dilakukan dengan baik dan optimal pula. Oleh karena itu, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang bersinergi.

Sasaran dalam Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan kepada perangkat daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Pengawasan keuangan dan kinerja;
3. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
4. Kegiatan reviu;
5. Kegiatan evaluasi; dan
6. Kegiatan pengawasan lainnya.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PERENCANAAN

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2017 didasarkan beberapa hasil analisis risiko dan pada saat pelaksanaan pengawasan dengan mekanisme penugasan sesuai dengan standar operasional prosedur.

1. PERENCANAAN BERDASARKAN ANALISIS RISIKO

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2017 berdasarkan hasil analisis risiko sehingga tujuan dari pengawasan akan tercapai secara efektif dan efisien. Analisis risiko tersebut adalah sebagai berikut :

a) Perubahan Perangkat Daerah

Telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mempengaruhi perubahan organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut maka terbit Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimaksud, mengakibatkan perubahan jumlah dan struktur perangkat daerah, sehingga menjadi pertimbangan dalam merencanakan program kerja pengawasan tahun 2017.

Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Biro Hukum;
- 2) Biro Tata Pemerintahan;
- 3) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
- 4) Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;
- 5) Biro Perekonomian;
- 6) Biro Administrasi Sekretariat Daerah;
- 7) Biro Umum;
- 8) Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
- 9) Biro Kesejahteraan Sosial;
- 10) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
- 11) Sekretariat DPRD;
- 12) Inspektorat;
- 13) Dinas Pendidikan;
- 14) Dinas Kesehatan;
- 15) Dinas Bina Marga;
- 16) Dinas Sumber Daya Air;
- 17) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 18) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 19) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 20) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- 21) Dinas Sosial;
- 22) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 23) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- 24) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- 25) Dinas Lingkungan Hidup;

- 26) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 27) Dinas Perhubungan;
- 28) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- 29) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
- 30) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 31) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 32) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 33) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 34) Dinas Kehutanan;
- 35) Dinas Perindustrian dan Energi;
- 36) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 37) Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- 38) Badan Pengelola Aset Daerah;
- 39) Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 40) Badan Usaha Milik Daerah;
- 41) Badan Kepegawaian Daerah;
- 42) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 43) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 44) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- 45) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 46) Kota/Kabupaten Administrasi.

b) Profil SKPD

Dokumen Profil SKPD tercantum rencana strategis, informasi kepegawaian dan informasi anggaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Profil SKPD ini menjadi pertimbangan untuk penentuan SKPD yang akan dilakukan pengawasan kinerja.

Pertimbangan pada dokumen Profil SKPD untuk menentukan SKPD yaitu :

- Indikator kinerja utama SKPD yang terdapat dalam rencana strategis SKPD serta termasuk dalam program prioritas dalam RPJMD.
- Besarnya anggaran pada SKPD menjadi salah satu perhatian utama untuk melakukan pengawasan, dikarenakan program dan kegiatan biasanya menjadi prioritas pembangunan daerah. Selain itu realisasinya juga menjadi pertimbangan, dikarenakan apabila realisasinya rendah, maka harus diidentifikasi permasalahan dan mencari solusinya agar ditahun mendatang bisa terealisasi lebih baik.
- Pengelolaan aset yang besar membutuhkan pengawasan yang lebih intensif, sehingga SKPD yang memiliki aset yang besar harus dijadikan prioritas pengawasan, hal ini juga mempengaruhi penilaian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Pengelolaan kepegawaian akan mempengaruhi kinerja SKPD, apabila semakin besar jumlah pegawainya maka perlu pengelolaan yang baik, oleh karena itu pengelolaan kepegawaian menjadi salah satu faktor yang harus dilakukan pengawasan.

- Tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK harus dilakukan upaya percepatan penyelesaiannya, yang menjadi prioritas pengawasan adalah SKPD dengan banyaknya jumlah kerugian daerah dan jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017. Prioritas kegiatan pengawasan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
- Pengawasan keuangan dan kinerja;
 - Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
 - Kegiatan reuiu;
 - Kegiatan evaluasi; dan
 - Kegiatan pengawasan lainnya (pendampingan, fasilitasi dan koordinasi).
- d) Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2016

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional Tahun 2016 menghasilkan 7 (tujuh) kesimpulan yang menjadi perhatian khusus dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasilnya adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 3 (tiga) penekanan pokok terhadap fokus pengawasan penyelenggaraan Pemda yang harus diterjemahkan bersama melalui koordinasi dan sinergi kedalam teknis pengawasan penyelenggaraan Pemda diantaranya, APIP menjadi Clearance dalam menentukan apakah pengaduan masyarakat berindikasi pidana atau administrasi. APIP harus mampu mencegah terjadinya pungutan liar (Pungli) di instansi masing-masing, dan APIP benar-benar mampu menjadi early warning system dan berorientasi kepada pencegahan.
- 2) APIP harus mampu merancang kegiatan pengawasannya dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- 3) Skema peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP, melalui rencana tindak maun bimbingan teknis secara berkelanjutan bagi APIP Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maupun Pemda yang akan difasilitasi melalui inisiasi dana pihak ketiga (hibah luar negeri) serta berkoordinasi dengan BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maupun Provinsi, untuk pengalokasian diklat penjenjangan bagi jabatan fungsional pengawasan pemerintah maupun diklat teknis substantif lainnya untuk peningkatan kapasitas APIP.

- 4) Skema peningkatan kuantitas (jumlah) APIP khususnya jabatan fungsional P2 melalui rencana tindak, revisi Permendagri Nomor 84 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis tata kerja tim penilai dan tata kerja penilaian angka kredit Jafung pengawasan pemerintahan khususnya Pasal 6 dimana tim penilai pusat (TPP) Jafung pengawasan pemerintahan diubah dari Badan Diklat Kemendagri ke Inspektorat Jenderal Kemendagri sesuai mandat pembentukannya. Revisi Permenpan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jafung pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dan angka kreditnya, khususnya terkait dengan Jafung keahlian penuh yaitu sampai Jafung pengawas pemerintahan utama (IV/e). Inpassing khusus untuk memenuhi kuota minimal kebutuhan Jafung pengawas pemerintahan di Provinsi, Kabupaten atau Kota yang berasal dari ASN di lingkungan Inspektorat daerah, ASN di lingkungan SKPD maupun inpassing dari Jafung lainnya. Perencanaan diklat penjurangan bagi Jafung pengawas pemerintah dan penilaian angka kredit yang sistematis, terkoordinasi dan berkesinambungan.
 - 5) Dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa, telah disusun pedoman pengawasan pengelolaan dana desa yang akan diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri sehingga terdapat keseragaman dalam pengawasan dana desa, yaitu Pemerintah Kabupaten atau Kota oleh APIP Provinsi meliputi pra penyaluran, penyaluran dan pasca penyaluran. Pemerintah Desa oleh APIP Kabupaten atau Kota meliputi pra pencairan dan penggunaan, pencairan dan penggunaan serta pasca pencairan dan penggunaan (Provinsi DKI Jakarta tidak ada dana desa).
 - 6) Terkait dengan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah (Aksi PPK Pemda), Pemda melakukan prosedural pelaporan secara rutin tiap 3 (tiga) bulan terkait pencapaian aksi PPK Pemda dengan fokus, pelimpahan seluruh wewenang penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan pembantu. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana hibah serta bantuan sosial (Bansos).
 - 7) Verifikasi pelaporan pencapaian keberhasilan aksi PPK Pemda Tahun 2016 dan 2017 sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dilakukan secara berjenjang, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan verifikasi pelaporan pencapaian keberhasilan aksi PPK Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Provinsi melakukan verifikasi pelaporan pencapaian aksi PPK Pemerintah Kabupaten atau Kota.
- e) Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 memiliki 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut :
- 1) Pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - 2) Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja;

- 3) Pembangunan energi dan telematika Jakarta;
- 4) Pengembangan sistem transportasi;
- 5) Antisipasi banjir, rob dan genangan;
- 6) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 7) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota;
- 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau;
- 9) Pembangunan budaya multikultur;
- 10) Peningkatan kapasitas aparatur;
- 11) Peningkatan pelayanan publik;
- 12) Peningkatan kualitas pendidikan; dan
- 13) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

2. MEKANISME PENUGASAN

a. Penerbitan Surat Perintah Tugas

- 1) Inspektur Pembantu Bidang/Pengendali Teknis mengajukan konsep Surat Perintah Tugas Pengawasan kepada Inspektur melalui Sekretaris, dengan melampirkan :
 - a) Kartu Kendali;
 - b) Pakta Integritas;
 - c) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - d) Program Kerja Pengawasan (PKP);
 - e) Daftar Materi Pengawasan (DMP); dan
 - f) Jadwal Kegiatan Pengawasan.
- 2) Ketua Tim Inspektorat Pembantu Wilayah mengajukan konsep Surat Perintah Tugas Pengawasan kepada Inspektur Pembantu Wilayah melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dengan melampirkan :
 - a) Kartu Kendali;
 - b) Pakta Integritas;
 - c) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - d) Program Kerja Pengawasan (PKP);
 - e) Daftar Materi Pengawasan (DMP); dan
 - f) Jadwal Kegiatan Pengawasan.
- 3) Pengajuan konsep Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang/Pengendali Teknis pada Inspektorat Pembantu Bidang dan Ketua Tim pada Inspektorat Pembantu Wilayah, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum bulan pengawasan yang diprogramkan.
- 4) Sekretaris/Kepala Subbagian Tata Usaha memproses usulan Surat Perintah Tugas tersebut untuk ditandatangani oleh Inspektur Provinsi dari Inspektorat Pembantu Bidang dan Inspektur Pembantu Wilayah.
- 5) Perpanjangan Surat Perintah Tugas hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat persetujuan dari Inspektur Provinsi dan/atau Inspektur Pembantu Wilayah, dengan terlebih dahulu membuat laporan pendahuluan.

- 6) Terhadap Tim yang bertugas baik di Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Pembantu Wilayah Kota / Kabupaten Administrasi yang masih memiliki kewajiban/tanggungans LHP yang belum selesai (maksimal 2 (dua)) tidak diperkenankan mengajukan Surat Perintah Tugas pemeriksaan berikutnya sebelum tim tersebut menyelesaikan LHP terhutang.

b. Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Sekretaris Inspektorat Provinsi membuat surat pemberitahuan tentang pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan kepada Para Inspektur Pembantu dan Para Inspektur Pembantu Wilayah sebelum bulan pengawasan yang diprogramkan.
- 2) Para Inspektur Pembantu dan Para Inspektur Pembantu Wilayah melaksanakan program kerja pengawasan sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditentukan.
- 3) Tim bertugas setelah menerima Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani dan telah diberikan nomor registrasi.

B. PELAKSANAAN

1. PEMBINAAN

Pembinaan yang dilakukan adalah bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prioritas :

- a. Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- b. Pembinaan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Pembinaan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
- d. Pembinaan dalam rangka pelaporan gratifikasi; dan
- e. Pembinaan dalam rangka sapu bersih pungutan liar.

2. PENGAWASAN KEUANGAN DAN KINERJA

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan prioritas :

- a. Aspek keuangan :
 - 1) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - 2) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - 3) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang/jasa;
 - 4) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - 5) pengelolaan manajemen kas di bendahara.

- b. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana :
 - 1) pengelolaan persediaan;
 - 2) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - 3) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan Personel, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D).
- c. Aspek pengelolaan sumber daya manusia/kepegawaian :
 - 1) peningkatan kompetensi aparatur sipil negara;
 - 2) penegakan disiplin aparatur sipil negara;
 - 3) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - 4) pembinaan aparatur sipil negara.
- d. Aspek tugas pokok dan fungsi :
 - 1) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; ;
 - 2) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
 - 3) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
 - 4) kepatuhan entitas terhadap hasil rewiu dokumen perencanaan dan penganggaran.

3. PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas :

- a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Penyalahgunaan wewenang;
- c. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- d. Pelanggaran disiplin pegawai.

4. KEGIATAN REWIU

Kegiatan rewiu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas :

- a. Rewiu dokumen perencanaan dan anggaran daerah;
- b. Rewiu laporan keuangan; dan
- c. Rewiu laporan kinerja instansi pemerintah.

5. KEGIATAN EVALUASI

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas :

- a. Evaluasi reformasi birokrasi;
- b. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.

6. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. Penyusunan standar operasional prosedur bidang pengawasan; dan
- c. Peningkatan kemampuan aparat pengawasan intern pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan.

C. PELAPORAN

1. PEER REVIU

Setiap Tim yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada Gubernur dan SKPD/UKPD agar terlebih dahulu dilakukan Peer Reviu dengan melampirkan :

- a. Program Kerja Pengawasan;
- b. Daftar Materi Pengawasan;
- c. Kertas Kerja Pengawasan;
- d. Bahan Konfirmasi;
- e. Berita Acara Ekspose; dan
- f. Draft LHP.

2. MEKANISME PELAPORAN

- a. Hasil Pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) paling lambat diselesaikan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya Surat Perintah Tugas.
- b. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang akan disampaikan kepada Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah wajib dilakukan reviu secara berjenjang.
- c. Sebelum Laporan Hasil Pengawasan (LHP) ditandatangani harus dilakukan ekspose hasil pengawasan terlebih dahulu oleh Tim.

- d. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
- e. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan oleh Inspektur Pembantu Bidang dan Inspektur Pembantu Wilayah kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris.

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]

SUMARSONO

JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN
INSEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2017

NO	URAIAN/UKUR	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI					
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DES												
A. PENGAWASAN KINERJA/ REGULER																									
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		1. Menilai keadaan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pengawasan/Pengawasan BPK RI dan A/P/P; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan: 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: - Pelaksanaan kesiap-siagaan menghadapi ancaman bencana; - Pelaksanaan lokasi evakuasi korban bencana; - Pelaksanaan Pelatihan Evakuasi	1. Memastikan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dengan prioritas pembangunan daerah yaitu Program Pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana. 2. Risiko terkait bantuan bencana alam	1. Desk audit/ pengawasan dokumen; 2. Wawancara/ klarifikasi; 3. Analisis Data; 4. Survey lapangan/ pengawasan fisik.	7	20
2	Badan Kepegawaian Daerah																		1. Menilai kepatuhan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pengawasan/Pengawasan BPK RI dan A/P/P; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan: 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: - Pengelolaan pembinaan kepegawaian; - Pengembangan Simpeg, Sispeg.	1. TKD; 2. Peningkatan Aparatur; 3. Pengembangan Karir.	1. Desk audit/ pengawasan dokumen; 2. Wawancara/ klarifikasi; 3. Analisis Data; 4. Survey lapangan/ pengawasan fisik.	7	20
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		1. Menilai kepatuhan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pengawasan/Pengawasan BPK RI dan A/P/P; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan: 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: - Pelaksanaan Regulasi/kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; - Pelaksanaan pemberian KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Kematian; - Pelaksanaan Penanganan Mobilisasi dan Migasi Peruduk; - Pelaksanaan terbit administrasi kependudukan bagi wilayah yang rentan adminduk.	1. Memastikan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dengan prioritas pembangunan daerah yaitu Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemantauan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Risiko terkait pelayanan kependudukan	1. Desk audit/ pengawasan dokumen; 2. Wawancara/ klarifikasi; 3. Observasi; 4. Survey lapangan/ pengawasan fisik.	7	20

NO	URAIAN/UKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI							
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES														
1	2	3												4	5	6	7	8	9	10							
B PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU																											
1	Pemantauan publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)																				Melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka percepatan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, mendorong SKPD/UKPD untuk segera mempublikasi RUP	UKPD	Mengevaluasi penyusunan HPS dan penetapan spesifikasi teknis atas pengadaan barang dan jasa	Percepatan pelaksanaan RBU	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data	30	5
2	Pemantauan Aset (Mobil) Sekretariat DPRD																				Untuk mengetahui keadaan penggunaan aset dan pemanfaatannya	Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta	Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD	1. Kendaraan hilang; 2. Penyalahgunaan Fungsi; 3. Pemanfaatan.	1. Penelitian peraturan 2. Penelitian dokumen 3. Survey Peninjauan Lapangan.	20	15
3	Pemantauan Pengadaan Tanah untuk RP/TRA Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kabupaten Kepulauan Seribu.																				Untuk mengetahui realisasi pembebasan tanah untuk RP/TRA	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Taman Kota Di 5 (lima) Wilayah Kota dan Kabupaten	Prosedur Pengadaan Tanah Penyalahgunaan Wewenang	1. Penelitian peraturan 2. Penelitian dokumen 3. Survey Peninjauan Lapangan.	20	15
4	Pemantauan LHKPN																				Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan PNS yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik KKN	SKPD / UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1. Pejabat pimpinan tinggi madya 2. Pejabat tinggi pratama 3. Pejabat administrator 4. Pejabat pengawas 5. Auditor	Kekayaan penyelenggara negara	1. Penelitian peraturan 2. Penelitian dokumen 3. Survey Peninjauan Lapangan.	20	15
5	Pemantauan Batasan Satuan Tugas Pengawajuguran Kebakaran dan Penyelamatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta																				Untuk melihat efektifitas tenaga barisan relawan kebakaran	Dinas Pengawajuguran Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dan 5 (lima) Suku Dinas Pengawajuguran Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi serta instansi terkait	Analisa kebutuhan tenaga barisan relawan kebakaran	1. Pengadaan Berdikembangkan Balakar. 2. Pemanfaatannya.	1. Penelitian peraturan 2. Penelitian dokumen 3. Survey Peninjauan Lapangan.	20	15
6	Pemantauan Pengawasan CCTV Pada Menara Mikrocell																				Untuk mengetahui apakah pembangunan Menara Telekomunikasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan baik secara teknis maupun administrasi serta sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	1. Menara Telekomunikasi Eksisting 2. Pembangunan Telekomunikasi Baru 3. Pempatan Perangkat, Lokasi Menara dan Bentuk Menara 4. Rekomendasi Menara Telekomunikasi 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi 6. Izn Pempatan Perangkat Telekomunikasi (IPPT) 7. Partisipasi/kontribusi CCTV Penyedia Menara Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian terhadap Menara Telekomunikasi	1. Tempatkan lokasi pemasangan; 2. Pemanfaatan.	1. Wawancara 2. Observasi 3. Analisis Data Peninjauan Lapangan	20	15
7	Pemantauan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Satuan Polisi Pamong Praja																				Untuk menilai dan mengevaluasi kontak kerja PTT dan efektifitas pelaksanaan tugas	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan 6 (enam) Wilayah	1. Menganalisa dan mengevaluasi kontak kerja PTT; 2. Mengevaluasi Pegawai PTT yang memiliki kemampuan di Bidang Keamanan dan Kelermban.	Pemberdayaan SDM (PTT)	1. Penelitian peraturan 2. Penelitian dokumen 3. Peninjauan Lapangan	20	15
8	Pemantauan Hukuman Disiplin Penajuhan																				Untuk mengetahui jumlah pegawai DKI yang terkena hukuman disiplin	SKPD Objek Periksa Bidang I	Pegawai di Lingkungan Pemda DKI Jakarta	Pelaksanaan Penerapan Sanksi	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data	20	15
9	Pemantauan Pengadaan Tanah untuk RP/TRA Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Utara																				Untuk mengetahui realisasi pembebasan tanah untuk RP/TRA	Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Dokumen Pengadaan Tanah	1. Prosedur Pengadaan Tanah. 2. Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat.	1. Penelitian peraturan 2. Penelitian dokumen 3. Survey Peninjauan Lapangan	20	15

NO	URAIAN UKRPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES							
1	2 Pendampingan dan ulup buku akhir tahun anggaran													4	5	6	7	8	9	10
21														11,12					12	60
22	Pengawasan atas Pensefifikasian dan Pematraan lahan RT/RTPU yang sudah dibebaskan pada Dinas Kehutanan													Untuk menilai apakah pelaksanaan pensertifikasi dan pematraan lahan RT/RTPU yang sudah dibebaskan pada Dinas Kehutanan, Pematraan dan Pemukiman telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan apakah telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif.	Lahan hasil pembebasan telah bersertifikasi atas nama Pemprov DKI Jakarta dan terbangun menjadi RT/RTPU	Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	1. Desk audit / Penelitian terhadap dokumen; 2. Peninjauan lapangan / fisik; 3. Wawancara / Permintaan keterangan dari pihak terkait.	20	15
23	Pengawasan penghunian rumah susun UPRS Daan Mogot dan UPRS Rawa Bebek													Menilai apakah pelaksanaan mekanisme penghunian dan pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Penghunian dan pemeliharaan rumah susun Daan Mogot dan rumah susun Rawa Bebek	SOP	Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	1. Desk audit / Penelitian terhadap dokumen; 2. Peninjauan lapangan / fisik; 3. Wawancara / Permintaan keterangan dari pihak terkait.	20	20
24	Pengawasan atas Kepatuhan dan Kesesuaian terhadap Izin Bangunan yang diterbitkan dengan Realisasinya pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perencanaan													Untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemberian pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perencanaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan apakah telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif.	Rekomendasi teknis atas Kesesuaian Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Realisasinya	Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	1. Desk audit / Penelitian terhadap dokumen; 2. Peninjauan lapangan / fisik; 3. Wawancara / Permintaan keterangan dari pihak terkait.	10	15
25	Pengawasan atas Pengelolaan Sampah pada TPST Bantargebang pada Dinas Lingkungan Hidup													Untuk menilai apakah pelaksanaan pengelolaan sampah pada TPST Bantargebang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan apakah telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif.	Mekanisme Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Air Sampah, dan Pengelolaan Pendopalan Jasa Retribusi	Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	1. Desk audit / Penelitian terhadap dokumen; 2. Peninjauan lapangan / fisik; 3. Wawancara / Permintaan keterangan dari pihak terkait.	10	15
26	Pengawasan atas Pelaksanaan Pembangunan dan Perawatan Rumah Susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													Untuk menilai apakah pelaksanaan pembangunan dan perawatan Rumah Susun telah sesuai dengan ketentuan.	Pengawasan pelaksanaan kontrak pembangunan dan perawatan Rumah Susun.	Kesesuaian pelaksanaan kontrak dan kondisi fisik pada pembangunan dan perawatan Rumah Susun.	1. Menetapkan program prioritas pembangunan daerah tahun 2017; 2. Anggaran yang besar; 3. Temuan tahun lalu; 4. Menopikan SKPD yang menjadi perhatian publik.	1. Desk audit / Penelitian terhadap dokumen; 2. Peninjauan lapangan / fisik; 3. Wawancara / Permintaan keterangan dari pihak terkait.	20	20
27	Pemantauan penyusunan RKGBU dan RKPPU													Melakukan evaluasi dan analisis dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dan penganggaran	Mengetahui kebutuhan barang sesuai tugas dan fungsi serta ketersediaan Barang Milik Daerah	Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data.	30	7
28	Pemantauan Penyerapan/Realisasi Anggaran Tahun 2017													Melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka percepatan penyerapan/realisasi anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan/Realisasi Anggaran	Percepatan realisasi pembangunan daerah	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data.	40	5
29	Pengawasan atas pembaharuan/pemeliharaan pimpinan													Menylesaikan permasalahan tertentu	Pememintah Provinsi DKI Jakarta	SKPD/UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Pengadaan Barang Jasa, Panitia Penemba Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data.	10	15

No	URAIAN/INDUK	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017	TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D. PENGAWASAN LAINNYA									
1	PENGAWASAN atas Pengadaan Masyarakat		Memberikan pendapat hasil pengawasan terhadap kebijakan, perilaku, dan produk hukum lainnya yang dinilai melanggar ketentuan.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	SKPD/UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Dugaan penyalanggunaan wewenang dan tindakan korupsi	1. Desk audit/ pengawasan 2. Penilaian dokumen; 3. Wawancara/ klasifikasi; 4. Survey lapangan/ pengawasan fisik (peninjauan lapangan).	5	15
2	Pelaksanaan Unit Pengendali Grafikasi		1. Menopikan Wilayah Bersih Grafikasi; 2. Potensi Grafikasi.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	SKPD/UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pencegahan tindakan korupsi	1. Memeriksa laporan 2. Melakukan peninjauan	10	5
3	Pelaksanaan sapu bersih pungutan liar		Mempraktikan Wilayah Bersih Pungli	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	SKPD/UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi	1. Peninjauan lapangan 2. Wawancara	10	10
1	Pelaksanaan inspeksi mendadak pada SKPD/UKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		Mengetahui SKPD/UKPD yang telah menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pengelolaan keuangan - Pengelolaan barang - Pengelolaan kepegawaian - Pengadaan barang/jasa - Pelayanan publik	SKPD/UKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Terbukti administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Peninjauan lapangan 2. Wawancara	5	5 setiap 1 hari dalam seminggu
2	Pematanaan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan/ Penanganan Kasus/ Pengaduan Masyarakat Tahun 2016 dan Tahun Sebelumnya		Meningkatkan percepatan proses Tindak Lanjut Hasil Pemantauan/ Penanganan Kasus/ Pengaduan Masyarakat Tahun 2016 dan tahun sebelumnya	Temuan dan rekomendasi/ saran hasil pemantauan/ penanganan kasus/ pengaduan masyarakat	SKPD/UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Percepatan penyelesaian TLHP	1. Penilaian dokumen; 2. Konsultasi/ diskusi; 3. Membuat kebijakan.	5	20
3	Pematanaan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan (TLHP) APJP Tahun 2016 dan Tahun Sebelumnya		Meningkatkan percepatan proses Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) APJP Tahun 2016 dan tahun sebelumnya	Temuan dan rekomendasi/ saran hasil Pengawasan APJP (inspektoral Provinsi DKI Jakarta, Ijen Kemendagri, BPKP, maupun Ijen teknis terkait lainnya)	SKPD/UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Percepatan penyelesaian TLHP	1. Penilaian dokumen; 2. Konsultasi/ diskusi; 3. Membuat kebijakan.	5	20
4	Pematanaan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan (TLHP) BPK Tahun 2016 dan Tahun Sebelumnya		Meningkatkan percepatan proses Tindak Lanjut Hasil Pemantauan (TLHP) BPK tahun 2016 dan tahun sebelumnya	Temuan dan rekomendasi/ saran hasil pemeriksaan	SKPD/UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Percepatan penyelesaian TLHP	1. Penilaian dokumen; 2. Konsultasi/ diskusi; 3. Membuat kebijakan.	10	20
5	Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016		1. Membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 2. Membenarkan keyakinan terhadap kebenaran akurat, keandalan, dan kesesuaian data/ informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas.	1. Pemeliharaan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 2. Pengujian atas keandalan dan akurat data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja	1. Keselarasan antara RPJMD Tahun 2013-2017, Penetapan IKU Tahun 2013-2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 dengan Rencana SKPD/UKPD; 2. Keandalan dan akurat data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja	Keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	1. Penilaian dokumen; 2. Wawancara/ klasifikasi; 3. Konsultasi/ diskusi	10	30

JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2017

NO	OBJEK PENGAWASAN / URAIAN	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI					
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES												
A													PENGAWASAN KINERJA / REGULER												
1	Suku Dinas Bina Marga												1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan AP.P.; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan; 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja.	Merupakan SKPD yang memiliki anggaran yang besar dan menjadi perhatian publik	1. Desk audit/pemeriksaan dokumen; 2. Wawancara/Konfirmasi; 3. Survei lapangan/pemeriksaan fisik (peminjaman lapangan);	22	20						
2	Suku Dinas Sumber Daya Air												1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan AP.P.; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan; 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja.	Memupakan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dengan prioritas pembangunan daerah yaitu Program "Peningkatan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya"	1. Desk audit/pemeriksaan dokumen; 2. Wawancara/Konfirmasi; 3. Survei lapangan/pemeriksaan fisik (peminjaman lapangan);	22	20						

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta

Nomor
 Tanggal

NO	OBJEK PENGAWASAN / URUAN	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
15	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (Pemaju)														1. Menilai Batasan Tanggung Jawab antara pejabat lama dengan pejabat yang baru. 2. Memberikan masukan kepada Kepala SKPD yang baru berupa rekomendasi/terjadinya penyimpangan/kelemahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan	1. Pengelolaan pengawasan; 2. Pengelolaan barang milik daerah; 3. Pengelolaan keuangan daerah.	1. Pengelolaan pengawasan; 2. Tata kelola barang 3. Tata kelola keuangan daerah.	Terlibit laporan pertanggung jawaban	1. Penilaian Dokumentasi; 2. Penilaian Laporan; 3. Penilaian Keterangan; 4. Pengisian Blanko/Questioner	9	10
16	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK Tahun 2016 dan Tahun Sebelumnya														Meningkatkan percepatan proses Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (TLHP) BPK Tahun 2016 dan tahun sebelumnya	Temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan	SKPD/UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlibit tindak lanjut hasil pemeriksaan	Pemantauan dokumentasi pendukung: bukti setoran, surat-surat tegur/pengamatan, dan bukti-bukti pendukung yang lain	22	20
17	Pengawasan atas Perintah/ Permintaan Pimpinan														Menyaksanakan permasalahan tertentu	Kota Administrasi	SKPD/UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017	1. Telaah staf, pengecekan data; 2. Permintaan keterangan; 3. Cek fisik	10	10
C PENGAWASAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT																					
1	Pengawasan Kasus Pengaduan/ Limpahan/ Perintah/ Pimpinan														Memberikan pendapat atas hasil pemeriksaan terhadap kebijakan, perilaku, dan produk hukum lainnya yang dinilai melanggar ketentuan.	1. Pengadaan Barang/ Jasa; 2. Sengketa pertanahan; 3. Tata kelola keuangan; 4. Tata kelola Barang Milik Daerah; 5. Tata kelola Aparatur; 6. Kebijakan Administrasi Pemerintahan.	SKPD/UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi	1. Pengecekan data; 2. Permintaan keterangan; 3. Cek fisik	10	20



P. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MARSONO

NO	OBJEK PENGAWASAN / URAIAN	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
6	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I														1. Menilai keadaan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan AP/P; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan; 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian perjanjian kinerja; - Pembinaan dan pengembangan kurikulum, sistem penilaian dan manajemen; - Penetapan izin pembukaan dan penutupan penyelenggaraan TK, SD, PLB, SLTP, SLTA dan Kejuruan; - Pembinaan sistem manajemen pengadaan dan penggunaan alat pelajaran dan sumber belajar; - Pembinaan, pengendalian dan pengembangan pendidikan kesetaraan dan sumber belajar, kursus dan kelangkaan serta pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini; - Peningkatan pembukaan, pengembangan, penutupan serta perizinan operasional satuan pendidikan nonformal dan informal	Mengapkan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017	1. Desk audit/pengawasan dokumen 2. Wawancara/klifikasi 3. Survey lapangan/pengawasan fisik (peninjauan lapangan)	10	20
7	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II														1. Menilai keadaan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan AP/P; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan; 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian perjanjian kinerja; - Pembinaan dan pengembangan kurikulum, sistem penilaian dan manajemen; - Penetapan izin pembukaan dan penutupan penyelenggaraan TK, SD, PLB, SLTP, SLTA dan Kejuruan; - Pembinaan sistem manajemen pengadaan dan penggunaan alat pelajaran dan sumber belajar	Mengapkan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017	1. Desk audit/pengawasan dokumen 2. Wawancara/klifikasi 3. Survey lapangan/pengawasan fisik (peninjauan lapangan)	10	20
8	Suku Dinas Lingkungan Hidup														1. Menilai keadaan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian pengawasannya/pengawasan BPK RI dan AP/P; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan; 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian perjanjian kinerja; - Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, Pengendalian Pencemaran dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Mengapkan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017	1. Desk audit/pengawasan dokumen 2. Wawancara/klifikasi 3. Survey lapangan/pengawasan fisik (peninjauan lapangan)	10	20

NO	OBJEK PENGAWASAN / URAIAN	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI									
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES																
PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERENTU (PDTT)																													
1	Pemanfaatan publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)															Melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa SKPD/UKPD	Mengevaluasi penyusunan HPS dan penetapan spesifikasi teknis atas pengadaan barang dan jasa	Percepatan pelaksanaan PBJ	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data	10	7							
2	Revisi RKV 2018 & usulan DPA perubahan 2017															Memberikan keyakinan terbalas mengenai akurasi, kehandalan dan keabsahan bahwa informasi dalam RKV SKPD/UKPD sesuai dengan PPAS dan Renja SKPD/UKPD, serta SKPD/UKPD telah menyusun RKBU dan RKPSU sesuai ketentuan	RKA SKPD/UKPD	Analisis standar belanja yang mencakup kewajiban beban kerja dan kewajiban biaya	Keselarasan antara perencanaan dengan pelaksanaan dan pelaporan	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data	10	7							
3	Pemanfaatan Penyelenggaraan/realisasi Anggaran Tahun 2017															Melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka percepatan penyelenggaraan/realisasi anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan/realisasi Anggaran	Percepatan realisasi pembangunan daerah	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data	10	10							
4	Pengawasan atas pembatalan/inspektasi pimpinan															Menyediakan permasalahan tertentu	Pemenuhan Provinsi DKI Jakarta	SKPD/UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Pengendalian Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang, Jasa, Panitia Pemilihan Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecepatan penatausahaan barang	Tata Kelola Persediaan	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data	10	15						
5	Pengawasan dalam rangka penutupan barang persediaan Semester I															Pengurus barang melaporkan barang persediaan tepat waktu	SKPD/UKPD	Kecepatan penatausahaan barang	Tata Kelola Persediaan	Verifikasi data barang	10	20							
6	Pengawasan dalam rangka penutupan kas dan persediaan akhir tahun 2017															Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang melaporkan kondisi keuangan dan barang di akhir tahun tepat waktu	Kas dan persediaan SKPD/UKPD	Untuk menentukan saldo kas dan persediaan akhir tahun anggaran 2017 pada SKPD/UKPD	Terbukti administrasi keuangan	Analisa dokumen	10	20							
7	Pemanfaatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI dan APSP tahun 2016 dan sebelumnya															Meningkatkan percepatan proses tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI dan APSP tahun 2016 dan sebelumnya	Temuan dan rekomendasi/saran hasil pemeriksaan	SKPD/UKPD, KPA, PPK, PPTK, PPKel, PPSU, PPHP dan ASN lainnya	Terbukti tindak lanjut hasil pemeriksaan	Pemintasan dokumen/data pendukung gugat/peringatan dan bukti bukti pendukung lainnya	10	20							
8	Pengawasan pelayanan kependudukan dan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)															Meyakinkan bahwa pelaksanaan pelayanan kependudukan dan KITAS telah sesuai prosedur	Pelayanan kependudukan	Kecepatan pelayanan kependudukan dan KITAS	Dugaan tindakan korupsi di pelayanan publik	1. Penelitian Dokumen/data 2. Peninjauan Lapangan 3. Permintaan Keterangan 4. Pengisian Blanko/Kuesioner	10	10							
9	Pengawasan izin usaha bidang kesehatan															Meyakinkan bahwa pelayanan izin usaha kesehatan telah sesuai prosedur dan pelaksanaannya di lapangan telah sesuai ketentuan	Izin Usaha Kesehatan	PTSP dan pelaku usaha	Dugaan tindakan korupsi di pelayanan publik	1. Penelitian Dokumen/data 2. Peninjauan Lapangan 3. Permintaan Keterangan 4. Pengisian Blanko/Kuesioner	10	10							
10	Pengawasan pemanfaatan halte dan parkir liar															Meyakinkan bahwa halte telah berfungsi sesuai dengan penunjukannya dan penegakan hukum terhadap kendaraan yang parkir tidak sesuai tempatnya	halte dan parkir liar	Kecepatan penggunaan halte dan usaha penegakan hukum parkir liar	Keterlambatan ruang publik	1. Penelitian Dokumen/data 2. Peninjauan Lapangan 3. Permintaan Keterangan 4. Pengisian Blanko/Kuesioner	10	10							

NO	OBJEK PENGAWASAN / URAIAN	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES									
11	Pengawasan izin pariwisata													4	5	6	7	8	9	10		
12	Pengawasan rehab gedung sekolah																					
13	Pengawasan Akhir Masa Jabatan (Pamjab)																					
PENGAWASAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT																						
1	Penanganan Kasus Pengaduan/ Limpahan/ Penitah Pimpinan																					



SUKMARSONO

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2017

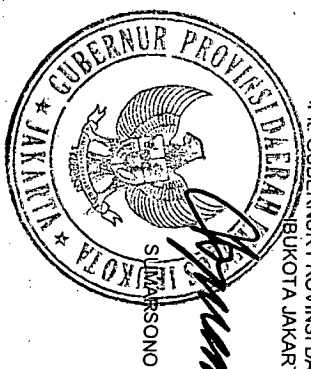
NO	OBJEK PENGAWASAN / URAIAN	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES								
1	PENGAWASAN KINERJA / REGULER Suku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu														1. Menilai kelayakan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APP; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan; 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian Pelembagaan Kinerja: Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Mengetahui Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Mengetahui Usaha Penanaman Modal	1. Desk audit/ pengawasan dokumen; 2. Wawancara/ klarifikasi; 3. Survey lapangan/ pemeriksaan fisik (penilaian lapangan);	10	20
2	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk														1. Menilai kelayakan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APP; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan; 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian Pelembagaan Kinerja: Anggaran berbasis kinerja yang disusun dengan mengait prinsip efektif efisien dan ekonomis sesuai dengan program dan sasaran; - Anggaran disusun dengan menggunakan e-Budgeting - Rencana Umum Pengadaan yang disusun telah mengkomodir rencana kebutuhan barang unit; - Rencana Umum Pengadaan telah dipublikasikan melalui papan pengumuman resmi; - Rencana penyediaan dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD); - Pencapaian Pengarusutamaan gender melalui PPRG; - Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak; - Gerakan sadar kesehatan gender sejak dini; - Program bina keharmonisan dan pemberdayaan keluarga; - Pengembangan potensi pemberdayaan perempuan; - Pengembangan potensi pemberdayaan perempuan; - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB	1. Untuk mengetahui terpenuhinya kebutuhan ruang publik atau anak; 2. Sebagaimana upaya pemecahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah dilakukan; 3. Uraja pengendalian pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta	1. Desk audit/ pengawasan dokumen; 2. Wawancara/ klarifikasi; 3. Survey lapangan/ pemeriksaan fisik (penilaian lapangan);	10	20

NO	OBJEK PENGAWASAN / URAIAN	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH JARI		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES									
6	Suku Dinas Kelautan Pangan, Kelautan, dan Perikanan															1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E). 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan. 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APSP. 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi: 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata Kelola keuangan; 2. Tata Kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata Kelola pegawai; 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja:	1. Mempakan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dengan prioritas pembangunan daerah yaitu Program pengendalian ketersediaan pangan, pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran dan Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil temenan pangan dan hortikultura	1. Desk audit/ pengawasan dokumen; 2. Wawancara/ klarifikasi; 3. Survey lapangan/ pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);	10	20
7	Suku Dinas Bina Marga															1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan. 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APSP. 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi: 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan; 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja : Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan: Pembangunan/ Peningkatan Jalan-jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta; dan Pembangunan Flyover, Underpass, dan Jembatan.	1. Mempakan SKPD yang memiliki anggaran yang besar dan menjadi perhatian publik	1. Desk audit/ pengawasan dokumen; 2. Wawancara/ klarifikasi; 3. Survey lapangan/ pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);	10	20
8	Suku Dinas Pendidikan I															1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E). 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan. 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APSP. 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi: 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata Kelola keuangan; 2. Tata Kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja: -Pembinaan dan pengembangan kurikulum, sistem penilaian dan manajemen; -Peningkatan dan pembukaan dan penutupan penyelenggaraan TK, SD, PLB, SLTP, SLTA dan Kejuruan; -Pembinaan sistem manajemen pengadaaan dan penggunaan alat pelajaran dan sumber belajar; -Pembinaan, pengendalian dan pengembangan pendidikan keistimewaan dan sumber belajar, kursus dan kelengkapan serta pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini; -Penerapan pembukaan, pengembangan, penutupan serta perizinan operasional satuan pendidikan nonformal dan informal	1. Mempakan SKPD dengan anggaran besar pada tahun 2017 yaitu Rp2.785.590.733.062,- 2. Mempakan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dengan prioritas pembangunan daerah yaitu : Pembangunan Sarpas Gedung Sekolah; Pengadaan Sarana yang diserahkan pada sekolah; Penyuluran dana BOS yang diberikan kepada sekolah;	1. Desk audit/ pengawasan dokumen; 2. Wawancara/ klarifikasi; 3. Survey lapangan/ pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);	10	20

NO	OBJEK PENGAWASAN / UJAPAN	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES								
9	Suku Dinas Pendidikan II														1. Menilai keabsahan/keperluan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APF; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan; 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian Pelembagaan Kinerja: sistem penilaian dan manajemen; - Penetapan tln perbaikan dan penutupan penyelenggaraan TK, SD, PLB, SLTP, SLTA dan Kejuruan; - Pembinaan sistem manajemen pengadaan dan pendayagunaan alat pelajaran dan sumber belajar; - Pembinaan, pengendalian dan pengembangan pendidikan kesetaraan dan sumber belajar; kursus dan kelengkapan serta pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini; - Penerapan pembukaan, pengembangan, penutupan serta perizinan operasional satuan pendidikan nonformal dan informal	Mempakan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017	1. Desk audit/ pengawasan dokumen; 2. Wawancara/ Klifikasi; 3. Survey lapangan/ pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);	10	20
10	Suku Dinas Sumber Daya Air														1. Menilai keabsahan/keperluan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APF; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan; 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/ jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian Pelembagaan Kinerja: Survei, dan kelayakannya; Pembangunan / Pengkajian Pmpa Sistem Polder dan kelayakannya; dan Pembatasan Tanah untuk Waduk, Situ dan Embung.	Merupakan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dengan prioritas pembangunan daerah yaitu Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	1. Desk audit/ pengawasan dokumen; 2. Wawancara/ Klifikasi; 3. Survey lapangan/ pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);	10	20

NO	OBJEK PENGAWASAN / URAIAN	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)																					
1	Pemantauan publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)														Melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka pencapaian penyimpanan dalam pengadaan barang dan jasa, mendorong SKPD/UKPD untuk segera mempublikasi RUP	Pengadaan barang dan jasa SKPD/UKPD	Mengevaluasi penyusunan HPS dan penetapan spesifikasi teknis atas pengadaan barang dan jasa	Percepatan pelaksanaan PBJ	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data	10	15
2	Pemantauan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Satuan Polisi Pamong Praja														Untuk menilai dan mengevaluasi kontrak kerja PTT dan efektifitas pelaksanaan tugas PTT dan evaluasi pelaksanaan tugas PTT dan 6 (enam) Wilayah	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan 6 (enam) Wilayah	1. Menganalisa dan mengevaluasi kontrak kerja PTT; 2. Mengevaluasi Pegawai PTT yang memiliki kemampuan di Bidang Keamanan dan Ketertiban.	Pembudayaan SDW (PTT)	1. Penilaian peraturan 2. Penelitian dokumen 3. Peninjauan Lapangan	10	15
3	Pemantauan Pengetahuan Hukuman Disiplin														Untuk mengetahui jumlah pegawai DKI yang terkena hukuman disiplin	SKPD Obkik Bidang I	Pegawai di Lingkungan Pemda DKI Jakarta	Pelaksanaan Penerapan Sanksi	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data	10	15
4	Pengawasan Kas Akhir Tahun (Tutup Buku) Tahun 2016														Mengetahui penyerapan anggaran akhir tahun 2016	kelelahan terhadap peraturan	SKPD/UKPD	Terbto administrasi keuangan	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data	10	5
5	Revisi Laporan Keuangan Semester II Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016														Majikan LKPD Per 31 Desember 2016, telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP	LKPD Provinsi DKI Jakarta Th 2016; LK SKPD / UKPD Th 2016	Laporan Keuangan yang disajikan oleh PKD, laporan keuangan mencakup LRA, Neraca,LO, LPE, LAK dan CaLK	Mendorong opini BPK menjadi WTP	1. Penilaian peraturan 2. Penelitian dokumen 3. Cek fisik	5	40
6	Pendampingan dan tutup buku akhir tahun anggaran														Mengetahui penyerapan anggaran akhir tahun 2016	ketelaan terhadap peraturan	SKPD/UKPD	Terbto administrasi keuangan	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data	10	15
7	Pemantauan penyusunan RKPB dan RKPB														Melakukan evaluasi dan analisis dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dan penganggaran	Mengetahui kebutuhan barang sesuai tugas dan fungsi serta ketersediaan Barang Milik Daerah	Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data	10	10
8	Pemantauan Penyerapan/Realisasi Anggaran Tahun 2017														Melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka percepatan penyerapan/realisasi anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan/Realisasi Anggaran	Percepatan realisasi pembangunan daerah	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data	10	30

NO	OBJEK PENGAWASAN	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES								
9	Pengawasan atas permasalahannya pimpinan														Menyediakan permasalahan tertentu	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	Proritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	1. Penilaian Dokumen/data 2. Peninjauan Lapangan 3. Pemeriksaan Keterangan Pengisian Blanku/Kuesioner		
10	Pengawasan Akhir Masa Jabatan (Fangjab)														1. Menilai Basaran Tanggung Jawab antara pejabat lama dengan pejabat yang baru; 2. Membentok masalah kepada Kepala SKPD yang baru berupa rekomendasi/terjadinya penyimpangan/kelemahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan	1. Pengabdian kepegawaian; 2. Pengelolaan barang milik daerah; 3. Pengelolaan keuangan daerah.	1. Pengabdian kepegawaian; 2. Tata kelola barang 3. Tata kelola keuangan daerah	Proritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	1. Penilaian Dokumen/data 2. Peninjauan Lapangan 3. Pemeriksaan Keterangan Pengisian Blanku/Kuesioner		
C. PENGAWASAN ATAS PENGAUDUAN MASYARAKAT																					
1	Pengawasan kasus Pengaduan Limpah/air Perintah Pimpinan														Membenarkan pendapat atas hasil pemeriksaan terhadap kejelasan, perilaku dan produk hukum lainnya yang dinilai melanggar ketentuan.	1. Pengadaan Barang/ Jasa; 2. Sengketa pertanahan; 3. Tata kelola pertanahan; 4. Tata kelola Barang Milik Daerah; 5. Tata kelola Aparatur; 6. Kebijakan Administrasi Pemerintahan.	SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	Dugaan penyimpangan wewenang dan tindakan korupsi	1. Pengesahan data; 2. Pemeriksaan keterangan; 3. Cek fisik		



PIL. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
JABODETABEK
BUKOTA JAKARTA.

[Handwritten signature]

NO	OBJEK PENGAWASAN / URAIAN	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES								
1																					
3	Suku Dinas Pendidikan I																				
4	Suku Dinas Pendidikan II																				
5	Suku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																				

1. Menilai kelayakan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E).
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan.
4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan A.P.P.
5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.

1. Tugas dan Fungsi;
2. Pengelolaan Keuangan;
3. Pengelolaan Barang milik Daerah;
4. Pengelolaan Aparatur.

1. Tatakelola Keuangan;
2. Tata Kelola Aset;
3. Pengadaan Barang/Jasa;
4. Tata Kelola Pegawai;
5. Pencapaian Pelembagaan Kinerja: Pungutan Iai pada pelayanan publik di sekolah, kondisi sarana dan prasarana sekolah, dan revitalisasi sekolah.

Merupakan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dengan prioritas pembangunan daerah yaitu: Pembangunan Sarpras Gedung Sekolah; Pengadaan Sarana yang disertakan pada sekolah;

1. Desk audit/ pemeriksaan dokumen;
2. Wawancara/ klarifikasi;
3. Survey lapangan/ pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);

18

20

1. Menilai ketepatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E).
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan.
4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan A.P.P.
5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.

1. Tugas dan Fungsi;
2. Pengelolaan Keuangan;
3. Pengelolaan Barang milik Daerah;
4. Pengelolaan Aparatur.

1. Tatakelola Keuangan;
2. Tata Kelola Aset;
3. Pengadaan Barang/Jasa;
4. Tata Kelola Pegawai;
5. Pencapaian Pelembagaan Kinerja: Pungutan Iai pada pelayanan publik di sekolah, kondisi sarana dan prasarana sekolah, dan revitalisasi sekolah.

Merupakan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017, dengan prioritas pembangunan daerah yaitu: Pembangunan Sarpras Gedung Sekolah; Pengadaan Sarana yang disertakan pada sekolah;

1. Desk audit/ pemeriksaan dokumen;
2. Wawancara/ klarifikasi;
3. Survey lapangan/ pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);

18

20

1. Menilai kelayakan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E).
3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan.
4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan A.P.P.
5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.

1. Tugas dan Fungsi;
2. Pengelolaan Keuangan;
3. Pengelolaan Barang milik Daerah;
4. Pengelolaan Aparatur.

1. Tatakelola Keuangan;
2. Tata Kelola Aset;
3. Pengadaan Barang/Jasa;
4. Tata Kelola Pegawai;

Merupakan SKPD yang memiliki program prioritas pelayanan terpadu tahun 2017, yaitu pelayanan perzinahan

1. Desk audit/ pemeriksaan dokumen;
2. Wawancara/ klarifikasi;
3. Survey lapangan/ pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);

18

15

NO	OBJEK PENGAWASAN / URAIAN	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES								
6	Suku Dinas Lingkungan Hidup														1. Menilai keataatan/kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APIP; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tatakelola Keuangan; 2. Tata Kelola Aset; 3. Pengadaan Barang/Jasa; 4. Tata Kelola Pegawai;	Menggunakan SKPD hasil dari Penggabungan fungsi atas urusan Lingkungan Hidup dan urusan Kebersihan, serta untuk menjamin tugas pokok dan fungsi atas urusan Lingkungan Hidup dari suatu Kantor menjadi satu Bidang dalam Suku Dinas, dijalankan sesuai ketentuan.	1. Desk audit/pemeriksaan dokumen; 2. Wawancara/Konfirmasi; 3. Survey lapangan/pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);	18	20
7	Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk														1. Menilai keataatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APIP; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tatakelola Keuangan; 2. Tata Kelola Aset; 3. Pengadaan Barang/Jasa; 4. Tata Kelola Pegawai;	Untuk mengetahui terpenuhinya kebutuhan ruang publik atau anak; Selainnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah dilakukan; Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	1. Desk audit/pemeriksaan dokumen; 2. Wawancara/Konfirmasi; 3. Survey lapangan/pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);	18	20
B PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)																					
1	Pemantauan Pencapaian Umum Pengadaan (RUP)														Melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa serta mendorong SKPD mempublik RUP ke dalam SIRUP	Pengadaan barang/jasa SKPD	Mengupdate/identifikasi kebutuhan, pemaketan pekerjaan, penyusunan KAK, HPS, penetapan spesifikasi teknis atas pengadaan barang dan jasa serta organisasi pengadaan	Percepatan pelaksanaan PBU	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data	18	20
2	Pemantauan terhadap Kinerja PHL/Non PNS Pemukiman di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur														Melakukan evaluasi dan analisis dalam Kinerja PHL/Non PNS Pemukiman di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	PHL/Non PNS di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	Mengetahui kinerja PHL/Non PNS di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	Kebutuhan tenaga PHL/Non PNS Pemukiman	1. Wawancara; 2. Observasi; 3. Analisis Data	18	20
3	Pemantauan/Percepatan/Realisasi Anggaran Tahun 2017														Melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka percepatan penyerapan/realisasi anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Percepatan/Realisasi Anggaran	Percepatan realisasi pembangunan daerah	1. Desk Audit 2. Wawancara 3. Peninjauan Lapangan (jika diperlukan)	18	20

NO	OBJEK PENGAWASAN / URAIAN	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI			
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES										
12	Pemantauan pelayanan KTRP (e-KTRP) pindahan dan daerah dan pelayanan ake kelahiran dari Puskesmas														Melihat dan menilai ketersediaan KTRP (e-KTRP) serta melihat dan menilai banayaknya penduduk luar kota DKI Jakarta yang pindah ke wilayah Jakarta Timur	Pelayanan KTRP (e-KTRP) pindahan dari daerah dan pelayanan ake kelahiran dari Puskesmas di 3 (tiga) Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Terselenggaranya Pemeriksa Pelayanan KTRP (e-KTRP) pindahan dan daerah dan pelayanan ake kelahiran dari Puskesmas apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perencanaan penduduk dan luar DKI ke wilayah Jakarta Pusat, keahwaan data kelahiran yang terbit dan ake kelahiran di Puskesmas	1. Desk Audit 2. Wawancara 3. Observasi 4. Peninjauan lapangan	18	20		
13	Pengawasan dalam rangka Penulisan Barang Persediaan Semester I TA 2017														Pengurus Barang melaporkan barang persediaan tepat waktu	SKPD di lingkungan Kota Adm Jakarta Timur	Ketepatan penatausahaan barang	Tata Kelola Persediaan	1. Desk Audit 2. Verifikasi data barang 3. Wawancara	18	20		
14	Pengawasan dalam Rangka Penulisan Kas Akhir Tahun 2017														Meyakini saldo kas dan persediaan akhir tahun anggaran 2017	Kas dan Persediaan	Untuk menentukan saldo kas dan persediaan akhir tahun anggaran 2017 pada SKPD / UKPD	Terbit administrasi keuangan	1. Pengumpulan data secara sampling; 2. Analisis dokumen; 3. Melakukan peninjauan lapangan; 4. Melakukan wawancara	18	20		
15	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (Pamjab)														1. Menilai Batasan Tanggung Jawab antara pejabat lama dengan pejabat yang baru; 2. Memeriksa masukan kepada Kepala SKPD yang baru berupa rekomendasi/perbaikan atas kemungkinan terjadinya penyimpangan/kelemahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan	1. Pengelolaan kepegawaian; 2. Pengelolaan barang milik daerah; 3. Pengelolaan keuangan daerah.	1. Pengelolaan kepegawaian: 2. Tata Kelola barang 3. Tata Kelola keuangan daerah.	Terbit laporan pertanggung jawaban	1. Penilaian Dokumen/data; 2. Peninjauan Lapangan; 3. Pemeriksaan Keterangan; 4. Pengisian Blanko/kuesioner	18	20		
16	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan (TLHP) BPK Tahun 2016 dan Tahun Sebelumnya														Meningkatkan percepatan proses Tindak Lanjut Hasil pengawasan (TLHP) BPK Tahun 2016 dan tahun sebelumnya	Temuan dan rekomendasi/ saran hasil pemantauan	SKPD/UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeritna Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	Terbit tindak lanjut hasil pemeriksaan	Pemeriksaan dokumen/data pendukung: bukti setoran, surat-surat teguran/peringatan, dan buktibukti pendukung yang lain	18	20		
17	Pengawasan atas Peminta/ Permintaan Pimpinan														Menyaksanakan permasalahan tertentu	SKPD di lingkungan Kota Adm Jakarta Timur	SKPD/UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeritna Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	1. Telaahan staf, Pengecekan data; 2. Pemeriksaan keterangan; 3. Cek fisik	18	10		
C	PEMERIKSAAN KASUS / AUDIT INVESTIGATIF																						
1	Penanganan Kasus Pengaduan/ Limpahair/ Perintah Pimpinan														Memberikan pendapat atas hasil pemeriksaan terhadap kebijakan, perilaku dan produk hukum lainnya yang dinilai melanggar ketentuan.	1. Pengadaan Barang/ Jasa; 2. Sengketa perantahan; 3. Tata kelola keuangan; 4. Tata kelola Barang Milik Daerah; 5. Tata kelola Aparatur; 6. Keajaian Administrasi Pemerintahan.	SKPD/ UKPD, KPA, PPTK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeritna Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	Dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi	1. Pengecekan data; 2. Pemeriksaan keterangan; 3. Cek fisik	10	20		



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUNARSONO

JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT WILAYAH PEMBANTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2017

NO	OBJEK/PENGAWASAN/GRILAH	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PEMERIKSAAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES							
1	PENGAWASAN KINERJA / REGULER													1. Menilai kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku; 2. Menilai apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan pengelolaan kepegawalan serta pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif; 3. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 4. Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas kemungkinan adanya kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi: 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata Kelola Keuangan; 2. Tata Kelola Aseel/Barang; 3. Pengadaan Barang/Jasa; 4. Tata Kelola Kepegawalan; 5. Pencapaian Penilaian Kinerja.	Sejalan dengan misi Pemprov DKI Jakarta "membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik serta menupayakan UKPD pelayanan dengan penambahan fungsi pelayanan Penanaman Modal	1. Desk Audit 2. Wawancara 3. Konfirmasi dan Peninjauan Lapangan (jika diperlukan)	5	20
2	Suku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													1. Menilai kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku; 2. Menilai apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan pengelolaan kepegawalan serta pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif; 3. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 4. Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas kemungkinan adanya kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi: 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata Kelola Keuangan; 2. Tata Kelola Aseel/Barang; 3. Pengadaan Barang/Jasa; 4. Tata Kelola Kepegawalan; 5. Pencapaian Penilaian Kinerja.	Sejalan dengan misi Pemprov DKI Jakarta "membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik serta menupayakan UKPD pelayanan dengan penambahan fungsi pelayanan Penanaman Modal	1. Desk Audit 2. Wawancara 3. Konfirmasi dan Peninjauan Lapangan (jika diperlukan)	5	20

Lampiran VII : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor
 Tanggal

NO	OBJEK/PENGAWASAN / JEMAH	RENCANA JAWAB PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PEMERIKSAAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES									
6	Suku Dinas Peranggujangan Kebakaran dan Penyelamatan															<ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku; 2. Menilai apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan pengelolaan kepegawain serta pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif; 3. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 4. Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas kemungkinan adanya kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola Keuangan; 2. Tata Kelola Aset/Barang; 3. Pengadaan Barang/Jasa; 4. Tata Kelola Kepegawain; 5. Pencapaian Penilaian Kinerja. 	<p>Program prioritas : Peningkatan sarana prasarana penanggulangan kebakaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desk Audit 2. Wawancara 3. Konfirmasi dan Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) 	5	10
7	Suku Dinas Bina Marga															<ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku; 2. Menilai apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan pengelolaan kepegawain serta pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif; 3. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 4. Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas kemungkinan adanya kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola Keuangan; 2. Tata Kelola Aset/Barang; 3. Pengadaan Barang/Jasa; 4. Tata Kelola Kepegawain; 5. Pencapaian Penilaian Kinerja. 	<p>Program prioritas : Peningkatan/peningkatan jalan dan jembatan, diantaranya Peningkatan jalan wilayah kecamatan, pemeliharaan berkala betal jalan dan perbaikan jalan lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desk Audit 2. Wawancara 3. Konfirmasi dan Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) 	5	20
8	Suku Dinas Sumber Daya Air															<ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku; 2. Menilai apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan pengelolaan kepegawain serta pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif; 3. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 4. Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas kemungkinan adanya kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola Keuangan; 2. Tata Kelola Aset/Barang; 3. Pengadaan Barang/Jasa; 4. Tata Kelola Kepegawain; 5. Pencapaian Penilaian Kinerja. 	<p>Sejalan dengan misi Pemprov DKI Jakarta menjadikan Jakarta Bebas dari masalah menahun seperti banjir melalui program peningkatan turap kali/saluran PHB; Pemeliharaan pompa, rumah pompa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desk Audit 2. Wawancara 3. Konfirmasi dan Peninjauan Lapangan (jika diperlukan) 	5	20

NO	OBJEK PENGAWASAN / URAIAN	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PEMERIKSAAN	JUMLAH PERSONEL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
9	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi														1. Menilai kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku; 2. Menilai apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan pengelolaan kepegawaian serta pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi, efisien dan efektif; 3. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 4. Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas kemungkinan adanya kelemahan/kekurangan dalam pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata Kelola Keuangan; 2. Tata Kelola Asef/Barang; 3. Pengadaan Barang/Jasa; 4. Tata Kelola Kepegawaian; 5. Pencapaian Penilaian Kinerja	Program prioritas : Peningkatan kemampuan kerja dan peningkatan sistem pelayanan pemerintahan kerja	1. Desk Audit 2. Wawancara 3. Konfirmasi dan Peninjauan Lapangan (jika diperlukan)	5	10
B PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (POTI)																					
1	Pengawasan Penulisan Buku dan Stock Opname Persediaan TA.2016														Menilai/mengetahui apakah Buku Kas telah dibuku sesuai dengan ketentuan, mengentahui posisi saldo akhir tahun, Setoran Sisa Anggaran dan posisi stock opname persediaan	UKPD di lingkungan Kota Adm. Jakarta Utara	1. Tata Kelola Keuangan; 2. Barang Persediaan.	Tertib administrasi keuangan dan persediaan	1. Desk Audit 2. Wawancara 3. Konfirmasi dan Peninjauan Lapangan (jika diperlukan)	20	5
2	Pemantauan publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)														Mengentahui tingkat kepatuhan SKPD/UKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa	JKPD di lingkungan Kota Adm. Jakarta Utara	Rencana Pengadaan TA 2017	Percepatan pelaksanaan PBJ	1. Desk Audit 2. Wawancara 3. Konfirmasi dan Peninjauan Lapangan (jika diperlukan)	20	10
3	Pengawasan Khusus atas Pengadaan Barang/Jasa pada Kecamatan/ Kelurahan Tanjung Priok														Menilai/mengetahui apakah pelaksanaan PBJ pada Kecamatan/ Kelurahan Tanjung Priok telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Kec Tanjung Priok & Kelurahanannya	Pengadaan Barang/Jasa	Kepercayaan dalam pengadaan barang/jasa	1. Desk Audit 2. Wawancara 3. Konfirmasi dan Peninjauan Lapangan (jika diperlukan)	5	20
4	Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)														Mengentahui apakah pelaksanaan PPDB sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak ada kecurangan	SD, SMP, SLTA	Peserta didik baru	Penerimaan peserta didik baru menjadi perhatian masyarakat	1. Desk Audit 2. Wawancara 3. Konfirmasi dan Peninjauan Lapangan (jika diperlukan)	20	15
5	Pengawasan Khusus Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil														Menilai/mengentahui kinerja Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sudin Kependudukan dan pencatatan sipil	Pelayanan kependudukan	Program prioritas : Pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil	1. Desk Audit 2. Wawancara 3. Konfirmasi dan Peninjauan Lapangan (jika diperlukan)	5	10

Lampiran VIII : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2017

NO	OBJEK PENGAWASAN / URAIAN	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
1	PENGAWASAN KINERJA / REGULER Suku Dinas Sumber Daya Air														1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APIP; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan; 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja	Mempastikan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017	1. Desk audit/pemeriksaan dokumen; 2. Wawancara/Identifikasi; 3. Survey lapangan/pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);	7	20
2	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja														1. Menilai keataatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E); 3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan; 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APIP; 5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.	1. Tugas dan Fungsi; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Pengelolaan Aparatur.	1. Tata kelola keuangan; 2. Tata kelola aset; 3. Pengadaan barang/jasa; 4. Tata kelola pegawai; 5. Pencapaian Perjanjian Kinerja	Mempastikan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017	1. Desk audit/pemeriksaan dokumen; 2. Wawancara/Identifikasi; 3. Survey lapangan/pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);	8	20

NO	OBJEK PENGAWASAN / URAIAN	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RINCIAN KUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES									
1																						
3	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																					
4	Suku Dinas Lingkungan Hidup																					
5	Suku Dinas Pendidikan																					

1. Menilai keabsahan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E);

3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan;

4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APJP;

5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.

1. Tugas dan Fungsi;

2. Pengelolaan Keuangan;

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Pengelolaan Aparatur;

1. Tata kelola keuangan;

2. Tata kelola aset;

3. Pengadaan barang/jasa;

4. Tata kelola pegawai;

5. Pencapaian Pelembagaan Kinerja

Menupakan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017

1. Desk audit/ pemeriksaan dokumen;

2. Wawancara/ klarifikasi;

3. Survey lapangan/ pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);

8

20

1. Menilai ketepatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E);

3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan;

4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APJP;

5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.

1. Tugas dan Fungsi;

2. Pengelolaan Keuangan;

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Pengelolaan Aparatur;

1. Tata kelola keuangan;

2. Tata kelola aset;

3. Pengadaan barang/ jasa;

4. Tata kelola pegawai;

5. Pencapaian Pelembagaan Kinerja

Menupakan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017

1. Desk audit/ pemeriksaan dokumen;

2. Wawancara/ klarifikasi;

3. Survey lapangan/ pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);

7

20

1. Menilai keabsahan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Menilai pelaksanaan prinsip efisiensi efektif dan ekonomis (3E);

3. Menilai apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan;

4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan APJP;

5. Memberikan rekomendasi/saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan tugas.

1. Tugas dan Fungsi;

2. Pengelolaan Keuangan;

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Pengelolaan Aparatur;

1. Tata kelola keuangan;

2. Tata kelola aset;

3. Pengadaan barang/ jasa;

4. Tata kelola pegawai;

5. Pencapaian Pelembagaan Kinerja

Menupakan SKPD yang memiliki program prioritas pembangunan daerah tahun 2017

1. Desk audit/ pemeriksaan dokumen;

2. Wawancara/ klarifikasi;

3. Survey lapangan/ pemeriksaan fisik (peninjauan lapangan);

7

20

NO.	OBJEK PENGAWASAN / URAIAN	JADWAL PENGAWASAN TAHUN 2017												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISIS RISIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH AHYAR			
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES										
1	PENGAWASAN ATAS PENGAJUAN MASYARAKAT														4	5	6	7	8	9	10		
1	Penanganan Kasus Pengaduan Limbahair/ Perintah Pimpinaan														4	5	6	7	8	9	10		
		Membentkan pendapat atas hasil pemertsaan terhadap kebijakan, perilaku, dan produk hukum lainnya yang dinilai melalngat ketentuan.												<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Barang/ Jasa; 2. Sempeta pertahanan; 3. Tata kelola keuangan; 4. Tata kelola Barang Milik Daerah; 5. Tata kelola Aparatur; 6. Kebijakan Administrasi Pemerintahan. 		SIPD/ UKPD, KPA, PPK, Pejabat Pengelola Kepegawaian, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemerina Hasil Pekerjaan, dan ASN lainnya di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		Dugaan penyalahgunaan wewenang dan lndakan korupsi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan data; 2. Pemeriksaan keterangan; 3. Cek fisik 		8	



P. H. MARSONO
 P. H. MARSONO
 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA